

STRATEGI KERJA SAMA OKI (ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM) DALAM MENCAPAI PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA

Tety Rachmawati
Universitas Lampung

Gita Karisma
Universitas Lampung

e-mail: tety.rachmawati@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

The normalization of relations between Arab states and Israel has not corresponded with substantive progress in the Israeli–Palestinian peace process. Likewise, the OIC Summit in Doha failed to generate collective measures capable of halting the ongoing genocide in Gaza. This study examines the Organization of Islamic Cooperation (OIC) through Kenneth A. Oye’s framework of Cooperation Under Anarchy, focusing on three analytical dimensions: the payoff structure, the shadow of the future, and the number of players. A qualitative case study approach was employed, drawing primarily on an extensive literature review. The findings indicate that the OIC functions predominantly as a normative and coordinative institution in addressing the Israeli–Palestinian conflict. This stance appears rational and advantageous for all parties, given the ideological and political divergences among member states. Furthermore, the OIC demonstrates long-term consistency in supporting Palestine through sustained political condemnation and efforts to establish continuous mechanisms that reinforce internal cohesion. However, the organization remains incapable of enforcing binding collective rules against members that violate cooperative commitments. To enhance its effectiveness in contributing to the Israeli–Palestinian peace process, the OIC should strengthen collective institutional arrangements by introducing positive incentives for compliance, fostering deeper inter-member cooperation, and promoting transparency and information-sharing mechanisms to build mutual trust among its members.

Keywords: *Cooperation Strategy, Israel, Organization of Islamic Cooperation (OIC), Palestine, Peace*

ABSTRAK

Normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel tidak sejalan dengan kemajuan proses perdamaian Israel–Palestina. Demikian pula, KTT OKI di Doha tidak menghasilkan langkah kolektif yang mampu menghentikan genosida di Gaza. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kerja sama OKI dengan menggunakan tiga pendekatan Kenneth A. Oye, dalam tulisannya yang berjudul *Cooperation Under Anarchy*, yaitu *payoff structure*, *shadow of the future*, dan *number of players*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, melalui studi

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OKI hanya berperan sebagai institusi normatif dan koordinatif dalam mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina, dengan alasan *pertama*, pilihan tersebut menjadi lebih rasional dan menguntungkan bagi semua pihak mengingat terdapat berbagai konflik ideologi dan kepentingan antar anggota OKI. *Kedua*, OKI terus menjaga kontinuitas dukungan terhadap Palestina secara jangka panjang, melalui kecaman politik yang tidak hanya sesaat, tetapi juga dengan mendorong mekanisme berkelanjutan, sebagai upaya memperkuat kohesi internal. *Ketiga*, aturan kolektif OKI tidak mampu dibangun untuk menghadapi aktor yang melanggar komitmen kerjasama. Oleh karena itu, dalam mencapai perdamaian Israel-Palestina, OKI perlu membangun aturan kolektif antar negara anggota berupa pemberian insentif positif bagi negara anggota yang patuh pada kesepakatan, meningkatkan intensi kerja sama antar anggota, serta menyediakan informasi untuk saling meningkatkan kepercayaan antar negara anggota.

Kata kunci: Israel, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Palestina, Perdamaian, Strategi Kerja Sama

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu yang terpanjang dalam sejarah. Konflik ini sudah ada sejak migrasi warga Yahudi ke Palestina yang saat itu dikuasi Turki Utsmani atas dukungan Kongres Zionis Pertama yang dipimpin Theodor Herzl tahun 1897. Orang Yahudi yang menjadi Tuan Tanah banyak yang mengusir warga Arab yang telah lebih dulu menghuni tanah Palestina. Konflik semakin memanas, saat Inggris resmi mengakui pembentukan negara Yahudi (*Jewish homeland*) melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, yang mendorong migrasi besar-besaran warga Yahudi ke Palestina. Tentara-tentara Zionist mulai melakukan serangan terhadap penduduk Palestina dan memaksa mereka mengungsi (Chughtai & Haddad, 2023). Puncaknya, sebelum lahirnya negara Israel, militan Zionis melakukan serangan terhadap penduduk Palestina dan mengusirnya dari tempat tinggal mereka. Sebanyak 6 juta penduduk Palestina harus mengungsi ke Lebanon, Suriah, Yordania, dan Tepi Barat (Aulia, 2024). Akibat pendudukan ini, timbul resistensi dari warga Arab, sehingga konflik antara warga Arab dan Yahudi terus berlangsung selama pendudukan Israel di Palestina.

Namun, konflik tidak selamanya menguntungkan, demikianlah yang dilihat orang presiden Mesir, Anwar Sadat dan perdana Menteri Israel, Menachem Begin, sehingga keduanya bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan menandatangani Perjanjian Camp David pada 1979. Perjanjian ini merupakan yang pertama menjadi pembuka jalan hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Israel. Lima belas tahun kemudian, tepatnya pada 1994, Yordania mengikuti langkah Mesir dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tahun 2020, Uni Emirat Arab (UEA) melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui penandatanganan Perjanjian Abraham Accords yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Di tahun yang sama, langkah UEA diikuti

oleh tiga negara lainnya yaitu Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Menurut Ayman Safadi, Perdana Menteri Yordania, normalisasi hubungan dengan Israel merupakan substitusi dari penyelesaian konflik Israel-Palestina (Anderson, 2021). Namun, normalisasi hubungan Israel yang dilatar belakangi saling ketergantungan ekonomi negara-negara Arab dan Israel justru membuat Palestina terkucilkan dilihat dari berkurangnya bantuan ekonomi dari negara-negara Arab ini (Rachmawati et al., 2025). Normalisasi ini juga mendorong negara-negara Arab memberikan bantuan pada Israel untuk mengamankan wilayahnya khususnya pada konflik yang terjadi antara 2023-2025. Belum ada solusi yang bisa menjadi jalan perdamaian Israel-Palestina, bahkan melalui normalisasi sekalipun.

KTU OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) selama 2023-2025 telah dilakukan beberapa kali seperti *Ninth Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference* tahun 2023, menyusul eskalasi konflik Israel-Palestina pasca 7 Oktober 2023, dilanjutkan *Arab-Islamic Extraordinary Joint Summit* pada November 2023, kemudian tahun 2024 diadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri dalam *Extraordinary Session of the OIC Council of Foreign Ministers*, serta *OIC-AL Extraordinary Joint Summit* masih di tahun yang sama, dan terakhir *21st Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers of OIC* tahun 2025. KTU tersebut merupakan respon dari eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Pertemuan tersebut mengeluarkan komunike yang tegas, kata-kata yang keras namun jarang mengambil tindakan (Sidqi, 2025). Menurut Sidqi setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, *pertama*, aturan konsensus yang menyeluruh menyebabkan sulitnya mengambil keputusan di organisasi ini, *kedua*, OKI tidak dapat memaksa anggotanya, *ketiga*, perbedaan kepentingan antar negara, mulai dari monarki yang condong ke Amerika Serikat sampai republic revolusioner, serta beberapa memiliki ikatan dengan Israel. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana strategi OKI dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina?

2. TINJAUAN LITERATUR

OKI merupakan organisasi terbesar kedua yang melibatkan beberapa negara di empat benua dunia. didirikan pada tahun 1969 dan berkantor pusat di Rabat, Maroko. Organisasi ini merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan anggota 57 negara Muslim seperti Arab Saudi, UEA, Iran, Pakistan, dll yang tersebar di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Eropa.

Organisasi ini di satu sisi dipandang cukup lemah dan nirfungsi. Sementara di sisi lain dianggap cukup sukses dalam memediasi berbagai perseteruan antara Muslim (Ali & Sultan, 2023; Wajid Ali et al., 2025). Keberhasilan organisasi ini dapat dilihat dari keberhasilannya untuk menggelar berbagai pertemuan dan skema oleh negara anggota yang menyediakan paket bantuan dan dana bagi umat Islam Palestina, kedekatannya dengan organisasi internasional lain seperti PBB, Uni Eropa, SAARC dan ASEAN untuk menggalang tekanan kolektif dalam menghentikan Israel bersikap keras dan brutal terhadap Palestina, serta pernyataan himbauan boikot terhadap

produk Israel dan Prancis, serta tak pernah berhenti menghadirkan netralitas dalam solusi dua negara (F. G. Khan, 2022). Kegagalan OKI adalah saat ia tidak berhasil dalam melindungi ibadah umat Islam, seperti saat pasukan Israel memasuki masjid al Aqsa, merusak tembok, atapnya dan membakar kitab suci Al-Qur'an serta menyiksa dan memukuli para jamaah dan menyerah terhadap tuntutan negara-negara Barat dan Eropa yang kuat untuk menerima Israel sebagai negara berdaulat (F. G. Khan, 2022). Masalah utama dan kelemahan OKI adalah bahwa ia secara tidak langsung dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar seperti AS dan Inggris karena mereka memiliki beberapa hubungan dekat dengan negara anggota OKI disamping itu juga ada Politik minyak di Timur Tengah antar negara-negara Teluk Persia dan pengakuan Israel oleh negara-negara tersebut juga menyabotase masa depan kemerdekaan Palestina (F. G. Khan, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan ringkasan holistic dari kerja sama OKI dalam mencapai perdamaian Israel-Palestina. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individual atau kelompok terhadap suatu masalah manusia atau sosial. Proses penelitian mencakup munculnya pertanyaan dan prosedur, data dikumpulkan di lingkungan partisipan, analisis data secara induktif yang dibangun dari detail-detail khusus menuju tema-tema umum, dan interpretasi makna dari data tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Menurut Creswell dalam penelitian kualitatif biasanya peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data seperti dari interview, observasi, dokumen, dan informasi audiofisual. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber dokumen, yang diambil dari buku, artikel jurnal, berita, dan berbagai website yang membahas kerja sama OKI dalam mencapai perdamaian Israel-Palestina. Analisis data dilakukan dengan *pertama*, prosedur simultan dengan mengumpulkan data dan menulis temuan-temuan dalam kerja sama OKI dan konflik Israel-Palestina. *Kedua*, menyaring data yang bertujuan untuk mendapatkan data agregat ke dalam tema-tema yang lebih kecil, dalam hal ini peneliti hanya mengambil data-data yang berhubungan dengan peran OKI dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. *Ketiga*, melakukan koding dengan mengorganisir, mengelompokkan, dan mencari informasi berbasis data teks atau gambar. *Keempat*, menghubungkan antar tema atau kategori. *Kelima*, menafsirkan makna data dengan membuat kesimpulan dari semua temuan, membandingkan semua temuan, mendiskusikan pandangan pribadi, serta membuat batasan penelitian. *Terkahir*, melakukan validitas data dengan cek akurasi dan kredibilitas dari temuan melalui triangulasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aksi Oki Dalam Mewujudkan Perdamaian Israel-Palestina

OKI dan konflik Israel-Palestina memiliki keterkaitan dalam sejarahnya. OKI berdiri sebagai respon atas kejahatan pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki oleh Israel berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh KTT bersejarah yang diselenggarakan di Maroko pada 25 September 1969. Hubungan antara pembentukan organisasi dan isu Palestina ini menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada OKI, karena isu Palestina dianggap sebagai alasan utama di balik pembentukan OKI (Alrantisi, 2025). Meskipun Organisasi Konferensi Islam (OKI) bertujuan untuk mendorong kerja sama antarnegara Muslim di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, namun tujuan utama OKI adalah untuk "mempromosikan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota (Pasal II A-I) (Al-Ahsan, 2004). Oleh karena itu, penyelesaian konflik antarnegara anggota merupakan salah satu fungsi utama OKI.

Sejak awal berdirinya, OKI telah menyaksikan sejumlah konflik antara dua atau lebih negara anggotanya, dan berupaya untuk mengatasinya, terutama konflik Israel dan Palestina. Secara struktural, OKI memiliki Department of Palestine and Jerusalem Affairs in the Organization of Islamic Cooperation, yang dimulai dengan menindaklanjuti implementasi keputusan, rekomendasi, dan rencana terkait urusan Palestina dan Yerusalem yang dikeluarkan oleh the Islamic Summit Conferences (KTT), Councils of Foreign Ministers and Ministerial Meetings. Tugas the Department of Palestine Affairs juga mencakup penyusunan laporan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan media yang bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, membantu mereka mendapatkan kembali hak-hak mereka yang sah, dan memberikan laporan-laporan tersebut kepada negara-negara anggota, badan-badan Organisasi, dan badan-badan terkait (Alrantisi, 2025). Selain itu, terdapat koordinasi upaya, posisi, dan kebijakan terhadap kota Yerusalem sebagai isu sentral, menindaklanjuti implementasi keputusan-keputusan Organisasi terkait pemantauan dan penanggulangan pelanggaran Israel dan kebijakan Yudaisasi, implementasi rencana strategis untuk pengembangan Yerusalem, aktivasi perjanjian kembar dengan Yerusalem, dan kontribusi dalam melestarikan identitas Arabnya serta melindungi situs-situs sucinya (Alrantisi, 2025). Dalam pengambilan keputusan, OKI menerapkan prinsip konsensus untuk menjamin bahwa semua negara anggota terwakili dalam kegiatan organisasi, dan mekanisme pemungutan suara diterapkan hanya ketika konsensus tidak memungkinkan, seringkali membutuhkan mayoritas dua pertiga anggota.

OKI juga telah mengeluarkan berbagai resolusi sebagai upaya untuk merespon konflik Israel Palestina termasuk juga memperjuangkan hak rakyat Palestina, dan status Yerusalem. Resolusi-resolusi OKI umumnya bertujuan untuk mendukung negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan mendukung hak penentuan nasib sendiri Palestina, menentang tegas pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki seperti wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan menekankan status khusus Yerusalem (Al-Quds) dan pentingnya Yerusalem bagi umat Islam. OKI menolak segala upaya untuk mengubah status demografis atau hukum Yerusalem. Selain itu, OKI juga mengecam berbagai pelanggaran hak

asasi manusia seperti penangkapan sewenang-wenang, pembongkaran rumah, dan pembatasan pergerakan. OKI mendukung bantuan kepada rakyat Palestina yang terdampak konflik, pengungsian, dan tantangan ekonomi, serta mendukung upaya-upaya internasional seperti boikot dan sanksi untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pendudukannya di Palestina.

Salah satu resolusi misalnya yang dikeluarkan sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada November 2023, yang menghasilkan resolusi yang memuat 31 keputusan tegas terkait upaya penghentian konflik antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza. Dalam resolusi tersebut, OKI secara keras mengecam tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza dan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengeluarkan resolusi yang dapat menghentikan kekerasan, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. OKI juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi khusus yang mengecam perusakan fasilitas rumah sakit di Gaza oleh Israel. Selain itu, beberapa forum internasional seperti *International Criminal Court (ICC)*, *International Court of Justice (ICJ)*, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan dimanfaatkan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan Israel. Dalam resolusi yang sama, OKI mengecam keras tindakan pemindahan paksa terhadap sekitar 1,5 juta warga Palestina dari wilayah utara ke selatan Gaza, yang berdasarkan Konvensi Jenewa IV dikategorikan sebagai kejahatan perang. OKI juga menyoroti adanya standar ganda dalam penerapan hukum internasional terhadap konflik tersebut.

Lebih lanjut, OKI mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan *genuine* guna mewujudkan perdamaian berdasarkan prinsip *two-state solution*. Resolusi tersebut juga menolak setiap upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, melalui resolusi ini, para pemimpin OKI memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membentuk *joint media monitoring unit* yang bertugas mendokumentasikan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Resolusi tersebut juga mengaktifkan *Islamic Financial Safety Net* guna menyediakan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Pemerintah Palestina dan *United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)*.

Resolusi OKI lainnya misalnya keluar pada 25 Agustus 2025. Dalam resolusi ini OKI juga mengeluarkan kecaman keras, serta berkali-kali menekankan untuk mendorong pembukaan blokade serta mendorong bantuan kemanusiaan, mendukung upaya gencatan senjata (OIC, 2025). Satu hal yang menarik sejak konflik antara Israel dan Palestina memuncak kembali pada Oktober 2023 hingga saat ini, OKI secara konsisten telah menyebut secara spesifik kejahatan yang dilakukan oleh Israel sebagai tindakan war crime (OIC, 2023) dan genosida terhadap rakyat Palestina (OIC, 2025). Padahal sebelumnya dalam kasus Israel-Palestina ini, OKI kerap menggunakan isu *human rights* dan menyoroti masalah minoritas (Azhar, 2019).

Sayangnya pandangan bersama soal isu genosida ini hanya sebatas pernyataan yang umumnya masih berupa himbauan dan kecaman bukan tindakan langsung dan nyata dari OKI. Satu satunya tindakan nyata tersebut adalah dorongan untuk melakukan boikot dan pemberian sanksi. Ini bisa dimengerti karena OKI juga tidak ada landasan yang dapat mengikat negara anggotanya dan tidak dapat menjanjikan apapun seperti bentuk aliansi yang komitmen terhadap pertahanan negara bersama, atau kerjasama regional yang menjanjikan pembangunan ekonomi regional bersama. Organisasi regional serta aliansi harus mampu maju bersama melawan ancaman bersama jika tidak maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan ekonomi dan pertahanan bersama. Lain halnya dalam kasus OKI, dimana negara tidak memiliki hal yang dipertaruhkan untuk harus melawan Israel bersama. Perlawanan dan pertempuran dengan Israel justru akan mengorbankan banyak kepentingan lainnya seperti memburuknya hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat.

Kasus di atas memberikan gambaran bagaimana OKI sebagai sebuah organisasi masih sangat terbatas dan sangat berhati-hati, bahkan tidak mengeluarkan kebijakan yang langsung dan nyata. Kebijakan yang dikeluarkan OKI terkait Israel Palestina, pertama, hanya bersifat kecaman. Kedua, upaya untuk gencatan senjata dilakukan dalam bentuk himbauan. Ketiga, tidak ada sanksi yang diberikan negara OKI terhadap Israel, bahkan OKI kerap melimpahkan dan mendesak negara negara dalam organisasi lain seperti PBB untuk menghentikan agresi dan memberi hukuman. Misalnya pada pasca berakhirnya tahap pertama gencatan senjata antara Israel dan Palestina pada Maret 2025, Israel langsung meluncurkan serangan yang menewaskan 15 pekerja darurat dan kemanusiaan di Jalur Gaza. Menanggapi kejadian tersebut, *Organization of Islamic Cooperation (OIC)* menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan brutal yang dilakukan oleh rezim Israel, yang telah mengakibatkan tewasnya 15 pekerja kemanusiaan. Melalui pernyataan resminya di situs *oic-oci.org*, OIC mendesak dibentuknya komisi penyelidikan internasional yang independen di bawah pengawasan *United Nations Security Council (UNSC)*. Komisi tersebut diharapkan dapat menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. OIC menegaskan bahwa seluruh tindakan pelanggaran tersebut harus diusut hingga tuntas dan para pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, OIC menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah politik, ekonomi, dan hukum terhadap Israel guna memaksa negara tersebut menghentikan agresinya serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dapat segera dilakukan.

Pola penyelesaian masalah di OKI juga cenderung reaktif. OKI misalnya menyelenggarakan KTT dan sesi-sesi khusus sebagai tanggapan atas perkembangan mendesak terkait isu tersebut, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk secara kolektif merespons dan mengekspresikan solidaritas di masa-masa kritis (Amir Nadeem, 2023). Di bawah ini dijelaskan lebih lanjut mengapa OKI sulit bertindak tegas, disebabkan bahwa sebagai organisasi, ia tidak memiliki kekuatan untuk mengatur negara anggotanya yang memiliki hubungan kompleks satu sama lain, serta tidak mau menyerahkan sepenuhnya kedaulatan negaranya untuk diatur oleh OKI.

3.2. Hubungan Kompleks Antar Negara Anggota Di OKI

Oye menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi terjadinya kerjasama yaitu *payoff structure*, *shadow of the future*, dan *number of players* (Oye, 1985a). Faktor pertama berkaitan dengan pilihan rasional yang dibuat oleh seorang aktor, yang dikenal sebagai *payoff structure*. Menurut Robert Axelrod dan Robert Keohane, *payoff structure* (yang mencakup *mutual* dan *conflicting preferences*) dapat diklasifikasikan ke dalam empat karakter, yaitu:

1. *The benefit of mutual cooperation (CC)*
2. *Relative to mutual defection (DD)*
3. *The benefits of unilateral defection (DC)*
4. *Relative to unrequited cooperation (CD)*

Keempat karakter ini muncul dari pola interaksi antar aktor atau negara, seperti dalam konteks organisasi OKI, di mana masing-masing pihak merespons tindakan pihak lain berdasarkan dinamika *game theory*. Dalam proses tersebut, negara kemudian menentukan apakah akan memilih jalur kerjasama atau justru mengambil langkah secara *unilateral*. Di dalam proses ini selalu ada tawar menawar bilateral maupun negosiasi multilateral. Organisasi artinya tetap berada di bawah kekuasaan negara dimana negaralah yang dapat menentukan bagaimana Lembaga dapat menciptakan norma-norma yang menarik bagi konstituen domestik dan berbagi informasi antar negara-negara).

Faktor **pertama**, terkait *payoff structure*, OKI dapat diilustrasikan sebagai organisasi yang kompleks. OKI memiliki banyak keanggotaan dimana ada pola kerjasama namun juga konflik serius diantara negara anggotanya. Ada semangat kerjasama untuk bersatu sebagai negara negara muslim terutama memberikan kebebasan Palestina. Namun, di lain hal, konflik ideologi dan kepentingan ekonomi dan keamanan masing masing negara telah membuat hubungan konfliktual antara beberapa negara OKI. Hal ini sedari awal sudah disadari OKI, utamanya saat OKI misalnya komitmen untuk mendorong kerja sama antarnegara Muslim di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tujuan utamanya adalah untuk *promote Islamic solidarity among member states* (Article II A-I)."

Oleh karena itu, penyelesaian konflik antarnegara anggota merupakan salah satu fungsi utama OKI. Akan tetapi upaya ini memang tidak mudah. OKI telah secara konsisten memperjuangkan hak-hak Palestina dan berupaya memediasi upaya perdamaian namun pengaruhnya dibatasi oleh perpecahan internal, kompleksitas geopolitik seperti fraksi di Timur Tengah dan dinamika diplomasi internasional seperti pengaruh US dan diplomasi Israel (Wajid Ali et al., 2025). Adanya aliansi yang dimiliki oleh beberapa negara Arab Moderat menyebabkan mereka lebih berhati-hati dalam mendukung kedaulatan Palestina. Negara-negara seperti Arab Saudi, meskipun masih mendukung kedaulatan Palestina, semakin memprioritaskan hubungan pragmatis dengan AS dan Israel karena kekhawatiran keamanan bersama di kawasan tersebut,

terutama terkait Iran. Negara-negara seperti Iran dan Qatar sangat mendukung kemerdekaan Palestina dan sering mengkritik negara-negara Arab yang terlibat dengan Israel. Namun, sikap mereka dapat memperburuk hubungan dengan anggota OKI yang moderat dan mempersulit upaya untuk membentuk kebijakan OKI yang kohesif. Perpecahan internal ini menyulitkan OKI untuk menampilkan front persatuan dan menentang kebijakan Israel, terutama ketika anggota kunci memiliki hubungan diplomatik, keamanan, dan ekonomi yang signifikan dengan Israel atau AS (Wajid Ali et al., 2025). Ketidakefektifan OKI memang banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti perpecahan internal, beragamnya kepentingan nasional di antara negara-negara anggota, dan terbatasnya pengaruh geopolitik organisasi tersebut (S. A. Khan, 2024).

Dalam kerangka Oye, *payoff structure* mengacu pada insentif dan konsekuensi yang memengaruhi pilihan aktor dalam kerja sama atau konflik. Kerja sama akan lebih mudah tercapai apabila keuntungan bersama (*mutual cooperation*) memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan keuntungan sepihak (*unilateral defection*).

Dalam konteks konflik Israel–Palestina, OKI berupaya mengubah *payoff structure* negara-negara anggotanya dengan hubungan yang konflikual tersebut di atas melalui upaya diplomasi kolektif yang memadukan pembentukan resolusi dan kebijakan politik. Resolusi yang dihasilkan pada KTT Luar Biasa OKI, misalnya, menegaskan pentingnya penghentian agresi Israel, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional. Tindakan kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan *cost* (biaya politik dan moral) bagi negara atau pihak yang memilih untuk tidak bekerja sama dalam upaya perdamaian, serta meningkatkan *benefit* bagi mereka yang berpartisipasi aktif.

Upaya ini cukup berhasil untuk mempertahankan OKI sebagai sebuah organisasi, namun masih sulit untuk menciptakan perdamaian untuk konflik Palestina dan Israel. Karena Keputusan yang dibuat tidak cukup untuk menggetarkan berbagai pihak untuk mengakhiri perang, terutama memaksa Israel untuk berhenti melakukan genosida. Akhirnya, OKI hanya berperan sebagai institusi normatif dan koordinatif yang berupaya menata ulang struktur imbal hasil agar kerja sama multilateral dalam mendukung Palestina menjadi lebih rasional dan menguntungkan bagi semua pihak.

Kedua adalah faktor iterasi, atau yang disebut juga dengan “*bayangan masa depan*” (*shadow of the future*). Faktor ini bicara mengenai bayangan yang dimiliki oleh aktor tentang masa depan organisasi apakah cukup menguntungkan mereka di masa depan. Semakin besar perhatian aktor terhadap keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan dibandingkan dengan keuntungan langsung yang tersedia saat ini, maka semakin kecil pula kecenderungan mereka untuk ingkar (*defect*). Misalnya, ketika aktor terlibat dalam isu ekonomi, mereka cenderung berasumsi bahwa hubungan antar mereka akan berlanjut dalam jangka waktu yang berkesinambungan dan tak terbatas.

Tiap negara anggota tentu memiliki bayangan masa depan masing masing berdasarkan kepentingan nasionalnya. Arab Saudi punya kepentingan keamanan yang lebih besar yaitu untuk dapat mencegah superioritas Iran. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan UEA, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel atau telah menormalisasi hubungan, seperti UEA dan Bahrain melalui Perjanjian Abraham, lebih berhati-hati dalam mendukung kedaulatan Palestina. Negara-negara ini seringkali memprioritaskan stabilitas regional, keamanan, dan hubungan ekonomi dengan Barat dan Israel daripada advokasi yang lebih agresif untuk kenegaraan Palestina (Wajid Ali et al., 2025). Sehingga yang dibutuhkan oleh Organisasi seperti OKI adalah memaksa anggota percaya akan masa depan OKI yang menjanjikan untuk anggota.

Peran OKI dalam aspek ini terlihat dari upayanya untuk menjaga kontinuitas dukungan terhadap Palestina secara jangka panjang, melalui kecaman politik yang tidak hanya sesaat, tetapi juga dengan mendorong mekanisme berkelanjutan, seperti pembentukan *joint media monitoring unit* untuk mendokumentasikan pelanggaran Israel, serta pengaktifan *Islamic Financial Safety Net* untuk menopang ekonomi Palestina dan mendukung UNRWA.

Dengan menciptakan mekanisme kelembagaan jangka panjang, OKI menumbuhkan *expectation of future interaction* di antara negara-negara anggotanya bahwa solidaritas dan dukungan terhadap Palestina akan terus berlanjut. Hal ini memperkuat kohesi internal dan mengurangi kecenderungan negara anggota untuk bersikap pasif atau menyimpang dari komitmen kolektif. Konsep *shadow of the future* menjelaskan sejauh mana aktor mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari interaksi mereka. Semakin besar bayangan masa depan, semakin tinggi insentif untuk mempertahankan kerja sama dan menghindari pelanggaran (*defection*).

Ketiga, yaitu aktor yang terlibat. Kemampuan aktor untuk menjalin kerjasama juga dipengaruhi oleh jumlah pihak atau aktor yang terlibat dalam interaksi serta bagaimana struktur hubungan di antara mereka terbentuk. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu:

- Aktor mampu mengidentifikasi pihak yang melakukan *defection*
- Aktor dapat menentukan respons yang tepat terhadap *defector*
- Aktor memiliki *long-term incentives* yang cukup kuat untuk menekan tindakan *defection*

Namun, ketika jumlah pemain atau aktor meningkat, pencapaian ketiga kondisi tersebut menjadi semakin sulit. Dalam situasi semacam itu, mengidentifikasi atau menghukum pihak yang ingkar sering kali menjadi hal yang sangat rumit, bahkan hampir mustahil dilakukan. Hal ini terjadi di dalam organisasi OKI, dimana OKI sulit menghukum negara anggotanya seperti Arab Saudi atau negara lain yang punya hubungan ekonomi atau telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Oye menjelaskan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam suatu sistem, semakin sulit mencapai kerja sama yang stabil karena meningkatnya biaya transaksi, perbedaan kepentingan, dan kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang melanggar kesepakatan (*defectors*).

Dalam hal ini, OKI menghadapi tantangan besar karena beranggotakan 57 negara dengan latar belakang politik, ekonomi, dan orientasi luar negeri yang beragam. Jika melihat ekonomi dari beberapa negara dalam 57 negara tersebut OKI adalah organisasi besar yang memiliki sumber biaya dari iuran anggota yang juga besar. Akan tetapi sayangnya banyaknya aktor negara yang terlibat ini juga meningkatkan kemungkinan adanya negara rasional yang membelot dan memicu spiral pembelotan. Sanksi bisa menjadi solusi untuk menghentikan pembelotan aktor namun kekuatan aktor sebagai negara jauh lebih besar dari pada kekuatan OKI itu sendiri. Sebagai contoh Arab Saudi mendanai 20 juta Riyal untuk inisiatif OKI dengan dukungan AS dan mereka menutup hubungan bilateral sejak awal (F. G. Khan, 2022). Amerika Serikat menekan Arab Saudi untuk mengubah pendiriannya terhadap Palestina dan menentang Israel karena negara tersebut merupakan anggota utama OKI yang mendukung dan berpengaruh (F. G. Khan, 2022). Pada tahun 2020, ketika Pakistan, Malaysia, dan Turki bergabung dalam pertemuan yang membahas masa depan Palestina dan Kashmir, pemerintah Arab Saudi menekan Pakistan untuk bergabung dengan aliansi baru tersebut dengan mengancam akan memotong pinjaman dan bantuan, serta menukar tenaga kerja Pakistan dengan tenaga kerja Bangladesh.

Selain itu, negara-negara Muslim seperti Mesir dan Yordania, Bahrain, UEA, Maroko, dan Sudan yang merupakan anggota organisasi Islam setelah memiliki kekuatan militer dan ekonomi, memulai hubungan bilateral dengan Israel (F. G. Khan, 2022). Bahkan Turki pada tahun 2022, yang kerap menyebut dirinya sebagai satu-satunya negara perwakilan umat Muslim melawan negara-negara Barat dan Eropa, telah mengakui Israel, dan memulai hubungan bilateral dengan kunjungan Erdogan ke Israel. Ini semua juga berkaitan dengan politik minyak di Timur Tengah antara negara-negara Teluk Persia dan pengakuan Israel oleh negara-negara tersebut (F. G. Khan, 2022). Fenomena ini semua tidak mampu dihentikan oleh OKI sebagai organisasi, karena negara memiliki kedaulatan dan bebas menentukan kebijakan luar negeri dan domestiknya masing-masing.

Aturan kolektif yang mengikat tidak mampu dibangun untuk menghadapi actor yang melanggar komitmen kerjasama, meskipun begitu setidaknya OKI dengan jumlah aktor yang besar didalamnya sebagai *Multilateral institutions* telah mampu membuat kesamaan kolektif tentang genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. OKI juga berhasil memfasilitasi pertemuan sehingga biaya informasi dan transaksi dapat ditekan. Dengan adanya pertemuan ini juga OKI berhasil membuat pernyataan kolektif meski bukan hukuman kolektif untuk menghadapi Israel.

Perbedaan kepentingan antar negara anggota sering kali membuat posisi OKI tidak sepenuhnya solid dalam mengambil langkah konkret terhadap Israel. Misalnya, terdapat perbedaan tingkat keterlibatan dan komitmen antara negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan yang menolak hubungan tersebut.

Namun demikian, keberadaan OKI sebagai platform multilateral justru berfungsi untuk mengelola keragaman kepentingan tersebut melalui mekanisme koordinasi, perumusan resolusi

kolektif, serta penyatuan posisi diplomatik di forum internasional seperti PBB, ICC, dan ICJ. Dengan demikian, meskipun banyaknya *players* dapat menjadi hambatan, OKI berupaya mengatasinya melalui institusionalisasi dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Dalam keragaman kepentingan dari banyaknya aktor dalam organisasi OKI, Palestina selalu mendapat dukungan penuh dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai anggota dan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan (Ashraf & Baqi, 2023).

3.3. Kerja Sama OKI dalam Perdamaian Israel-Palestina

Hubungan antar negara OKI terlalu kompleks dengan berbagai kepentingan aktor, apa strategi dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama? Di dalam kerja sama masing-masing negara tidak dapat mengejar kepentingan yang terlalu sempit karena itu dapat berakibat fatal.

Berikut penjelasannya menurut teori oye. Pertama, strategi untuk meningkatkan pengenalan dan memperpanjang bayangan masa depan. Pemerintah dapat mempromosikan kerja sama dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan. Di dalam sebuah kerja sama penting untuk menjelaskan norma secara eksplisit. Hal ini penting agar pendefinisian norma perilaku kooperatif dan non-kooperatif semakin jelas sehingga memungkinkan penggunaan strategi timbal balik yang lebih efektif (Oye, 1985b). Hal ini bisa dilakukan oleh anggota OKI dengan menyepakati kerja sama yang dilakukan secara bertahap. Kerja sama yang dilakukan dalam upaya perdamaian harus memiliki manfaat jangka panjang sebagai “bayangan masa depan” (*shadow of the future*) yang memberikan manfaat bagi semua anggota OKI. Negara-negara yang telah memiliki hubungan normalisasi dengan Israel, cenderung memiliki bayangan masa depan lebih baik dengan Israel. Negara-negara ini dapat mendorong kerja sama dengan Israel, namun, imbalik baliknya adalah bergaining atas Palestina. Misal, Uni Emirat Arab (UEA) sebagai negara yang memiliki aktivitas perdagangan terbesar dengan Israel dibandingkan negara Arab lain (Cafiero, 2025) mencapai 3,2 miliar USD tahun 2024 atau meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, UEA memiliki kemampuan untuk memberikan imbalan jangka panjang bagi perdagangan dengan Israel. Karena bagi Israel UEA adalah mitra strategis untuk pasar teknologi Israel sekaligus gerbang menuju pasar regional dan internasional yang lebih luas (Cafiero, 2025). Sebelum normalisasi UEA telah menjalin kerja sama dengan perusahaan intelijen siber Israel, NSO Group, untuk mengakses alat pengawasan canggih termasuk spyware Pegasus. Artinya, insentif imbal balik yang diberikan UEA dengan formalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel, dapat dilakukan kembali oleh UEA pada Israel. UEA juga dapat memberikan bayangan masa depan yang lebih baik bagi Israel dengan memberikan kemudahan mengakses pariwisata UEA yang menjadi destinasi liburan musim dingin tertas warga Israel. Jika memutuskan hubungan dengan Israel dianggap dapat merusak citra UEA yang secara implisit berarti pengakuan pada “kesalahan strategis”, UEA dapat meningkatkan citra dan reputasinya sebagai proyeksi pemimpin regional Timur Tengah dengan memberikan imbalan bagi Israel untuk menyepakati perdamaian dengan

Palestina. Hal tersebut juga yang menjadi dasar bagi Israel dalam alasannya melakukan normalisasi dengan Palestina.

Sektor kerja sama UEA dan Israel mencakup kerja sama komunikasi teknologi, finansial, energi terbarukan, pertanian, pengelolaan air, kesehatan dan pertahanan sipil. UEA telah berinvestasi di Israel dengan membeli saham ladang minyak Tamar Israel oleh perusahaan Mubadala Petroleum. Investasi yang sama juga dilakukan Israel dengan membuka cabang OurCrowd, perusahaan firma modal ventura Israel, di UEA. Kerja sama pertahanan seperti penempatan sistem pertahanan rudal Barak 8 buatan Israel di UEA, pengembangan produksi drone laut, dan pendirian anak perusahaan elektornik terpenting Israel, Emiriti oleh Elbit System Ltd (Zielińska, 2023). Perlu diingat bahwa kerja sama UEA dan Israel merupakan kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit), artinya, kedua negara sama-sama saling membutuhkan.

Pilihannya, jika Israel membelot atau curang maka UEA dapat melakukan hal yang sama. Sehingga, kerja sama tidak akan saling menguntungkan kedua belah pihak. UEA dapat memodifikasi struktur imbalan melalui strategi unilateral, yaitu tindakan sepihak yang dapat mengurangi keuntungan sendiri dari eksploitasi dan mengurangi ketakutan lawan terhadap eksploitasi. Hal ini dapat dilihat dari kekhawatiran negara-negara Arab akan visi "Israel Raya", tidak hanya di Palestina, tetapi juga Lebanon, Suriah, dan Yaman, yang dapat berdampak pada keamanan kolektif negara-negara Arab.

4. KESIMPULAN

Sesungguhnya pada titik tertentu diharapkan negara negara anggota dapat bangkit menjadi kekuatan mandiri yang tidak banyak bergantung dari negara lain, sehingga di masa depan OKI dapat membuat aturan dan resolusi yang lebih berkekuatan dan berdampak seperti embargo dan lainnya untuk menghentikan Perang Israel dan Palestina.

Selain itu, dalam penyelesaian konflik Israel dan palestina diperlukan upaya bersama, tidak hanya dari satu atau dua organisasi saja melainkan semua elemen dalam politik global. Salah satu pendekatan ditawarkan seperti model multifaset sebagai pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi sensitivitas agama dan realitas politiknya dalam konflik Israel Palestina. Pendekatan multifaset yang melibatkan OKI, UN, international community, ICJ, Major Powers dan multilateral diplomacy untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dalam konflik Palestina-Israel, menekankan peran aktor internasional sambil menyoroti perlunya strategi yang ditandai dengan pendekatan terpadu dan multilateral yang menyeimbangkan masalah hukum, diplomatik, kemanusiaan dan keamanan untuk menciptakan jalan menuju perdamaian dan penyelesaian (Bacha et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahsan, A. (2004). Conflict among Muslim Nations: Role of the OIC in Conflict Resolution. *Intellectual Discourse*, 12 No. 2, 137–157.
- Ali, T., & Sultan, H. (2023). Emerging role of the organization of Islamic cooperation in the global governance since 1969. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2202052.
<https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2202052>
- Alrantisi, M. (2025). The Position of the Organization of Islamic Cooperation on the Palestinian Issue. *Politics and Religion Journal*, 19(1), 35–47. <https://doi.org/10.54561/prj1901035a>
- Amir Nadeem. (2023). *ROLE OF ARAB STATES, THE ARAB LEAGUE AND THE OIC IN THE PALESTINE-ISRAEL DISPUTE: A COMPLETE FIASCO*.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10472130>
- Anderson, B. (2021, April 15). *Becky Anderson on Instagram: 'I spoke with Ayman Safadi about relations with Israel, and how normalization agreements in the region might have an impact on the prospect for peace. On Israel laying the blame on Jordan for its cancelled trip to the UAE, he said: "You renege on an agreement with Jordan, you disrupt a religious visit, you create conditions that made this religious visit on a holy occasion impossible, and then you expect to come to Jordan and fly out of Jordan -- let's be serious here."* Instagram. <https://www.instagram.com/beckycnn/reel/CMU-JdGnGJb/>
- Ashraf, M., & Baqi, A. (2023). Analyzing the Israel-Palestine Conflicts: Assessing the Impact and Effectiveness of the Involvement of Islamic Countries. *Regional Lens*, 2(1), 40–49.
<https://doi.org/10.62997/rl.2023a.25513>

- Aulia, L. (2024, May 15). *Derita akibat Perang Gaza Melampaui Nakba 1948*. Kompas.id.
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/05/14/derita-akibat-perang-gaza-melampaui-nakba-1948>
- Azhar, H. (2019). The OIC and Conflict Resolution: Norms and Practical Challenges. In *The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights*. University of Pennsylvania Press.
- Bacha, M., Zain, R., Khattak, H., & Sartaj, S. (2024). Analyzing the Palestine-Israel conflict: Deciphering the fusion of religious beliefs and political realities leading to a turbulent landscape. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)*, 5(2), 164–181. <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/5.2.11>
- Cafiero, G. (2025). Five Years On, UAE-Israel Normalization Weathers the Gaza Storm. *Middle East Council on Global Affairs*. https://mecouncil.org/blog_posts/five-years-on-uae-israel-normalization-weather-the-gaza-storm/
- Chughtai, A., & Haddad, M. (2023). *A brief history of Israel-Palestine conflict in 10 maps*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Khan, F. G. (2022). Israel-Palestine Conflict and the Role of International Organizations. *Pakistan Review of Social Sciences*, 3 No.1.
- Khan, S. A. (2024). THE Israel-Palestine War and The Failure of the OIC: A Deep Dive Into Ineffectiveness. *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences*, 3(3).

OIC. (2025, Agustus). *OIC Resolution addressing the ongoing Israeli aggression against the Palestinian people, (Non-UN Document)*. United Nations.

<https://www.un.org/unispal/document/oic-resolution-addressing-the-ongoing-israeli-aggression-against-the-palestinian-people-non-un-document/>

OIC, O. of I. C. (2023). *OIC: Israeli Military Aggression Against the Palestinians is a War Crime. OIC: Israeli Military Aggression Against the Palestinians Is a War Crime*.

https://www.oic-oci.org/topic/ampg.asp?t_id=39735&t_ref=26689&lan=en

Oye, K. A. (1985a). Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies. *World Politics*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.2307/2010349>

Oye, K. A. (1985b). Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies. *World Politics*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.2307/2010349>

Rachmawati, T., Lestari, R., & Fadhlillah, N. (2025). *Dampak Normalisasi Hubungan Israel dan Negara- Negara Arab Terhadap Isu Israel-Palestina*. 9.

Sidqi, A. M. (2025, September 24). Strong voices, limited action: What the Doha Summit reveals about the OIC. 360. <https://360info.org/strong-voices-limited-action-what-the-doha-summit-reveals-about-the-oic/>

Wajid Ali, Ayesha Alam, & Dr Ghulam Mujtaba Shah. (2025). Assessing the OIC's Role in the Israel-Palestine Conflict: Challenges and Effectiveness. *Social Science Review Archives*, 3(1), 1957–1966. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i1.505>

Zielińska, K. (2023, April 4). *Israel and the Arab states: Between conflict and interdependence*. OSW Centre for Eastern Studies. <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2023-04-04/israel-and-arab-states-between-conflict-and-interdependence>



*"Reclaiming Palestine: Interdisciplinary Reflections on Justice,
Resistance, and Reconstruction Under Occupation"*